



REVISI

PERJANJIAN KINERJA

2021

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 20 Desember 2021

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,71
			IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83
			IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	30
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan	%	0,2
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79,0

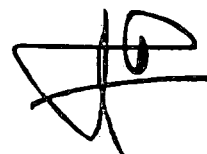
Kegiatan**Anggaran**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	1.830.529.361.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	1.186.081.810.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	1.176.761.837.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	505.697.960.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	521.981.858.000
6.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	511.200.022.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	2.000.000.000
	Total	Rp.	5.734.252.848.000

Disetujui

MENTERI PERHUBUNGAN**BUDI KARYA SUMADI**

Jakarta, 20 Desember 2021

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT****Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**



MELAYANI NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI